

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata

Robyan Bafadal^{1*}, Maharani Damaradewi²

¹⁻²Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

*Penulis Korespondensi: robyanbafadal@gmail.com

Abstract. *One of Indonesia's key strategies for generating foreign exchange is the development of Tourism Villages. A Tourism Village refers to a rural area that is utilized as a recreational destination due to its natural beauty, cultural uniqueness, and local attractions that appeal to tourists. The development of Tourism Villages inevitably involves the Village Government as the main authority in village administration. Tourism Village development is an integral part of community empowerment, as it encourages local residents to actively participate in village development activities. Through effective empowerment programs, the Village Government can enhance community capacity, increase economic opportunities, and strengthen local potential in a sustainable manner. This study employs a qualitative research approach. The qualitative research process involves several important stages, including formulating research questions, applying appropriate research procedures, collecting specific data from participants, analyzing data inductively from particular themes to broader patterns, and interpreting the meaning of the findings. Using this approach, the study reveals that the role of the Village Government is crucial in planning, managing, and supporting Tourism Village development. Strong leadership, community involvement, and strategic empowerment initiatives are essential factors in ensuring the successful and sustainable development of Tourism Villages in Indonesia.*

Keyword: *Development; Government; Role; Tourism; Village.*

Abstrak. Salah satu strategi utama Indonesia untuk menghasilkan devisa adalah pengembangan Desa Wisata. Desa Wisata merujuk pada daerah pedesaan yang dimanfaatkan sebagai destinasi rekreasi karena keindahan alamnya, keunikan budayanya, dan daya tarik lokal yang memikat wisatawan. Pengembangan Desa Wisata tak pelak lagi melibatkan Pemerintah Desa sebagai otoritas utama dalam administrasi desa. Pengembangan Desa Wisata merupakan bagian integral dari pemberdayaan masyarakat, karena mendorong warga setempat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Melalui program pemberdayaan yang efektif, Pemerintah Desa dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan peluang ekonomi, dan memperkuat potensi lokal secara berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian, menerapkan prosedur penelitian yang tepat, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema tertentu ke pola yang lebih luas, dan menafsirkan makna temuan. Dengan menggunakan pendekatan ini, studi ini mengungkapkan bahwa peran Pemerintah Desa sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan dukungan pengembangan Desa Wisata. Kepemimpinan yang kuat, keterlibatan masyarakat, dan inisiatif pemberdayaan strategis merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan Desa Wisata di Indonesia.

Kata Kunci: Desa; Pariwisata; Pembangunan; Pemerintah; Peran.

1. PENDAHULUAN

Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Dalam ajang bergengsi *Readers' Choice Awards 2025* yang digelar oleh majalah perjalanan ternama Condé Nast Traveller, Lombok berhasil meraih peringkat kedua sebagai Pulau Terbaik di Asia dengan skor mengesankan, yakni 94,86 poin. Prestasi ini menegaskan posisi Lombok sebagai ikon pariwisata berkelas dunia, sekaligus menambah kebanggaan bagi Indonesia di mata internasional. Pemerintah Provinsi NTB menyambut gembira penghargaan tersebut dan berkomitmen untuk terus mengembangkan

pariwisata berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. (Sancaya, 2025)

Sejak dahulu Lombok memang dikenal karena pariwisatanya. Sebelum terkenal Pantai Mandalika dan sirkuitnya Lombok lebih dulu dikenal dengan keindahan Pantai Senggigi dan Gili Trawangan. Sejarah pariwisata Senggigi dimulai sekitar awal tahun 1980-an, menjadikannya destinasi utama dan pusat pariwisata pertama di Lombok. Sebelum berkembang pesat, kawasan ini adalah pemukiman nelayan sederhana. Perkembangan pariwisata ditandai dengan pembangunan fasilitas akomodasi seperti Aerowisata Senggigi Beach Hotel yang dibuka pada tahun 1987, seiring dengan pesatnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Aerowisata Senggigi Beach Hotel berganti nama menjadi Kila Senggigi Beach Hotel pada 23 April 2014 hotel ini kembali berganti nama menjadi Merumatta Senggigi Lombok.

Senggigi dan Gili Trawangan tidak bisa dipisahkan. Boleh jadi orang Belanda pertama yang menemukan pulau Gili Trawangan adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1597. Ketika dalam perjalanan pulang (kembali ke Belanda) setelah singgah di pelabuhan Lombok (pantai timur pulau Lombok) dan pelabuhan Kloengkoeng (pantai timur Bali) kapal bergerak ke arah pulau Gili Trawangan karena lebih aman (pantai timur Bali di sekitar Karangasem banyak karang yang berbahaya). Tentu saja yang memegang teropong terbaik adalah Cornelis de Houtman karena dia adalah pimpinan ekspedisi. Baru pada ekspedisi kedua pulau Gili Trawangan dipetakan tahun 1599. Cornelis de Houtman tidak sempat lagi melihat pulau Gili Trawangan untuk kali kedua, sebab dalam pelayaran ke Lombok, Cornelis de Houtman tewas dalam pertempuran di Atjeh. Itulah sejarah terawal tentang pulau Gili Trawangan (Anonim, 2020).

Lombok juga pernah memperkenalkan konsep Wisata Halal. Tujuan pendirian wisata halal di Lombok bagi pemerintah setempat adalah untuk meningkatkan nilai budaya dengan identitas Islami yang dianggap sebagai wujud kearifan lokal melalui pembangunan Daerah Kawasan Ekonomi khusus (KEK). Konsep wisata halal kemudian merupakan upaya pengembangan ekonomi kawasan dengan menyesuaikan nilai dan norma warga setempat. Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid dan Serambi Madinah artinya kental dengan nuansa Islam. Pengembangan pariwisata halal secara ideal juga ditujukan untuk mewujudkan masyarakat NTB yang “Beriman” oleh masyarakat setempat dimaknai dengan masyarakat yang agamis (Islami), yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berakhlak mulia dan saling menghargai satu sama lain.

Sebenarnya kata wisata dan halal agak timpang. Wisata yang asli katanya bersenang-senang kemudian kerap dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Sementara “halal” adalah istilah yang sangat erat dengan relasi kehidupan orang-orang Islam (Muslim) yaitu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam ajaran Islam sesuai kitab suci umat Islam. Relasi kata “halal”, memiliki makna yang sangat beragam, diantaranya dalam hal makanan, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Meskipun pengertiannya timpang tetapi jika disandingkan menjadi bentuk padanan kata maka akan terdapat keterkaitan yang saling memberikan makna yang kuat dimana aktivitas ekonomi juga merupakan bagian dari pembangunan karakter identitas manusia yang Islami (Maulidi, 2019).

Tulisan ini akan membahas mengenai Desa Wisata. Pengembangan seperti ini mempunyai dua maksud, pertama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa dan kedua untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat pedesaan melalui keterlibatan masyarakatnya sebagai pelaku kegiatan pariwisata di desanya (Nuryanti, 1999; Suansri, 2003). Lebih lanjut, Damanik mengemukakan bahwa pengembangan desa wisata pada dasarnya dilakukan dengan berbasis pada potensi yang dimiliki masyarakat pedesaan itu sendiri (Damanik & Weber, 2006). Dengan demikian, melalui pengembangan desa wisata diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi berbasis masyarakat seperti industri kerajinan, industri jasa-perdagangan, dan lainnya (Goodwin & Santilli, 2009; Ashley & Roe, 2002). Hal semacam ini diharapkan menjadi faktor daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata. (Tyas & Damayanti, 2018)

Karena bicara tentang Desa Wisata tentu saja melibatkan Pemerintah Desa. Pengembangan Desa Wisata merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan merupakan suatu hal paling utama dalam pembangunan di desa. Masyarakat desa harus bisa mandiri sehingga program-program menjadikan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek pembangunan. Dengan begitu maka pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mampu menjadikan masyarakat mampu berperan aktif dalam melakukan pembangunan yang ada di desa. perbaikan pada peran pemerintah desa juga merupakan suatu hal yang perlu untuk di prioritaskan. (Syarifudin & Ma'ruf, 2022)

Tulisan ini memilih Desa Wisata Kembang Kuning yang terletak di kaki Gunung Rinjani, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian. Secara teoritis, Desa Wisata Kembang Kuning sudah termasuk dalam kategori Desa Wisata Maju menurut jejaring Desa Wisata di bawah naungan Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Republik Indonesia.

Konsep

Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pembangunan lokal berdasarkan adat-istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan hukum adat yang menempati suatu wilayah, dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh beberapa orang sebagai pembantunya guna melaksanakan pemerinta

Adapun Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Pasal 1 ayat 3, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dijelaskan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang mana Pemerintah Desa tersebut adalah seorang Kepala Desa atau sebutan lainnya sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Kepala Desa tersebut dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Sihombing, 2021).

Sebenarnya desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.(Dilahur, 2016).

Desa Wisata

Desa Wisata adalah wilayah pedesaan yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi karena memiliki keindahan alam yg menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sehingga berpotensi menghasilkan devisa bagi daerah tersebut. (Sihombing, 2021). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desa Wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut. (Shafira Fatma Chaerunissa & Yuniningsih, 2012).

Menurut kemenparekraf desa wisata memiliki empat tingkatan: (1) Desa Wisata Rintisan. Masih berupa potensi, belum memiliki produk dan belum adanya kunjungan wisatawan. Selain itu sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, dengan tingkat kesadaran masyarakat belum tumbuh. (2). Desa Wisata Berkembang. Meski masih berupa potensi, namun sudah mulai dilirik untuk dikembangkan lebih jauh. Desa wisata berkembang juga sudah bisa menerima tamu. (3). Desa Wisata Maju. Masyarakatnya sudah sadar wisata dengan indikator sudah dapat mengelola usaha pariwisata, termasuk menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata. Wilayahnya juga sudah dikunjungi banyak wisatawan, termasuk dari mancanegara. (4). Desa Wisata Mandiri. Sudah ada inovasi pariwisata dari masyarakat. Destinasi wisatanya juga sudah diakui dunia dengan sarana dan prasarana yang terstandarisasi. Selain itu pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix. (Krisnawati, 2021).

Teori Peran

Penelitian ini mengkaji tentang peran Pemerintah Desa dalam pengembangan objek Wisata di Desa Kembang Kuning dalam hal ini peneliti menggunakan teori peran yang dikembangkan Pitana dan Gayatri bahwa Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata yang terdiri dari beberapa komponen yang di kemukakan memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya yaitu (1).Motivator, (2).Fasilitator, (3).Dinamisator. (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

Menurut Mudjiono yang dimaksud peran sebagai motivator yaitu memberikan motivasi atau dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Lebih jelas lagi menjadi motivator adalah mendorong orang lain melakukan sesuatu. Peran fasilitator merupakan peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya serta dapat

mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya, meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan, Selanjutnya peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan Kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi unit analisis (Amelinda & Asbari, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2014) Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu Kepala desa, Kaur Perencanaan, Ketua Pokdarwis, masyarakat desa, dan pelaku wisata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivator

Pemerintah Desa memiliki peran sebagai motivator agar pariwisata terus berjalan. Pemerintah adalah pihak yang memiliki kekuasaan sehingga bisa memaksa berbagai pihak untuk mendukung pengalakan pariwisata di daerahnya. Pemerintah adalah motivator utama

yaitu pihak yang bisa memberikan dorongan dan semangat bagi segenap elemen untuk mendukung program pembangunan termasuk pariwisata. Motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

Dalam pengelolaan pariwisata peran pemerintah sebagai motivator penting untuk mendorong masyarakat mengelola dan mengembangkan obyek wisata di daerahnya. Pemberian motivasi ini penting agar masyarakat mengerti arah pembangunan dan bagaimana agar obyek wisata perlu dijaga dan geliat pariwisata terus berjalan. Semua yang terlibat dalam pariwisata baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat merupakan pihak yang harus terus menerus diberikan motivasi agar pariwisata berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan motivasi yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan di desa.

“Sebagai pemimpin desa, saya merasa penting untuk memberi contoh terlebih dahulu. Oleh karena itu kami rutin melakukan sosialisasi langsung ke dusun-dusun, menyampaikan bahwa desa wisata ini bukan hanya untuk kepentingan desa, tapi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kami tampilkan tokoh lokal yang sudah berhasil dari sektor wisata agar masyarakat melihat bahwa ini nyata, bukan hanya teori. Saya selalu katakan yang kita miliki bukan hanya keindahan alam, tapi juga budaya dan keramahan. Itu harus dijaga dan dikembangkan bersama.”(Wawancara dengan L. Sujian 6 Juni 2025)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran dari Pemerintah Desa yaitu memberi motivasi kepada masyarakat dengan jalan turun langsung sosialisasi pentingnya pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Pengembangan pariwisata di desa bukan hanya kepentingan desa tetapi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Desa tidak hanya menawarkan konsep tetapi juga menghadirkan mereka yang telah berhasil dalam bidang pariwisata. Hal ini penting sebagai contoh keberhasilan anggota masyarakat memanfaatkan potensi yang dimiliki desanya. Tidak hanya potensi alam untuk mengundang wisatawan dibutuhkan juga keramahan dan kelestarian budaya setempat sebagai penunjang keindahan alam.

Selain itu, Pemerintah Desa sebagai motivator melakukan Pengembangan Wisata yaitu dengan salah satu program kerja yang dilakukan oleh seksi promosi dan pemasaran produk dalam bidang pembinaan dan pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan pihak Pemerintah beserta masyarakat terhadap wisatawan. Kegiatan promosi dalam pengembangan objek pariwisata sangat penting agar masyarakat tahu bahwa di terdapat objek wisata yang masih asri. Dalam hal Peran Pemerintah Desa tentang pengembangan objek wisata, mereka juga melakukan promosi, sebagaimana diungkapkan Kepala Urusan Perencanaan Umum,

“Kami sebagai perangkat desa berada di garis depan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Maka, kami merasa bertanggung jawab tidak hanya menjalankan administrasi, tapi juga membangun semangat warga agar mau terlibat dalam kegiatan desa wisata. Dalam berbagai kesempatan, kami sampaikan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya tergantung pada Kepala Desa atau Pokdarwis saja, tetapi sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Kami sering turun langsung ke dusun, berdialog santai dengan warga, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan motivasi bahwa setiap orang bisa punya peran entah itu membuka warung, menjual produk lokal, jadi pemandu, atau sekadar menjaga kebersihan lingkungan. Kami juga selalu menyampaikan keberhasilan-keberhasilan kecil yang sudah dicapai seperti meningkatnya kunjungan wisatawan, berkembangnya homestay, atau pelaku usaha kecil yang mulai laris. Dengan itu, masyarakat mulai merasa percaya diri dan tidak takut mencoba hal baru.” (Wawancara dengan Masran 6 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas ditemukan kemudian peran Pemerintah Desa untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pariwisata bagi desa. Pengembangan pariwisata mungkin hal yang baru pada mahasiswa sehingga mereka ragu untuk memulai langkah. Namun pemberian penjelasan secara terus menerus akan membuka wawasan mereka tentang pentingnya pengembangan pariwisata untuk masyarakat. Makin berkembangnya pariwisata tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tetapi masyarakat secara keseluruhan. Dan tujuan pembangunan ialah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dimana pemerintah menjadi pendorong dan ujung tombak dari pembangunan itu.

Promosi dilakukan mengandalkan terutama media sosial. Promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap ini dilakukan melalui media online yaitu facebook, instagram dan youtube dilakukan secara langsung. Upaya ini dilakukan dalam bentuk menarik perhatian pengunjung untuk mengunjungi obyek wisata. Promosi ini juga merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan wisata. Selain itu, Pengembangan objek Wisata tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pihak luar. Berikut hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha pariwisata.

"Saya secara pribadi maupun sebagai tokoh masyarakat sangat mengapresiasi sikap Kepala Desa yang mau turun langsung ke dusun- dusun untuk memberi semangat kepada warga. Langkah ini sangat penting, karena masyarakat tidak hanya butuh program, tapi juga butuh keteladanan. Ketika (P)enyampaian yang dilakukan secara langsung, disertai dengan menghadirkan tokoh lokal yang sudah berhasil di sektor wisata, membuat masyarakat lebih mudah percaya dan termotivasi. (D)ari sisi pelaku wisata, saya merasakan dampak positifnya.

Masyarakat mulai percaya diri membuka homestay, menjual produk lokal, atau bahkan jadi pemandu. Semua ini berawal dari dorongan dan motivasi yang terus disampaikan oleh pemerintah desa. (Wawancara dengan Saleh 17 Juni 2025).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bagaimana pemerintah selaku pemilik kekuasaan berusaha memberikan semangat bagi masyarakat untuk mengembangkan modal yang mereka miliki. Bagi yang memiliki modal besar bisa membuka penginapan untuk dihuni para wisatawan. Bagi yang memiliki modal tidak banyak bisa menjual berbagai macam produk lokal sebagai oleh-oleh. Dan bagi yang memiliki kecakapan berbahasa bisa menjadi pemandu wisata. Semuanya berpulang pada kemampuan modal yang dimiliki masyarakat. Pemerintah kemudian bertugas untuk mengembangkan modal yang dimiliki masyarakat untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan pariwisata yang ada di daerahnya.

Fasilitator

Peran fasilitator berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penyedia fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi wisata. Peran ini juga menyangkut perbaikan lingkungan baik fisik maupun perilaku warga. Peran ini meliputi proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

Peran Fasilitator merupakan peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada di wilayah otonominya serta dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini sendiri dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

Dalam konteks ini, Pemerintah Desa memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang penggunaan teknis, strategi, dan pelaksanaan dalam program yang bermanfaat bagi pengembangan objek meliputi,

Menyediakan sarana dan prasarana

Menyediakan alat maupun bangunan yang membuat pengunjung betah di pulau tersebut yaitu dengan menyediakan mushollah, toilet, villa, gazebo dan berbagai fasilitas lainnya. Sebagaimana diungkapkan Kepala Desa,

“..(S)elain itu kami juga mendampingi warga dalam pengurusan perizinan homestay, membentuk dan memperkuat kelembagaan seperti Pokdarwis, serta membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga—baik dari dinas, LSM, hingga swasta”(Wawancara dengan L. Sujian 6 Juni 2025)

Menyediakan fasilitas bagi masyarakat.

Pariwisata mendorong pengunjung untuk tidak datang sekali tetapi berkali-kali ke suatu objek dengan menyediakan fasilitas dasar seperti kamar mandi, air bersih dan listrik. Hal ini dilakukan kerjasama antara pemerintah Desa dengan pihak lain seperti pemerintah atau swasta. Pemerintah Desa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana mengembangkan potensi wisata yang ada di daerahnya.

Fasilitas yang perlu dibangun oleh Pemerintah Desa kemudian berkaitan dengan akses pengunjung ke daerah wisata tersebut. Selain itu juga fasilitas yang membuat wisatawan untuk betah di daerah wisata. Sebagai diungkapkan oleh pelaku wisata.

“...Pembangunan akses jalan ke lokasi wisata, penyediaan fasilitas seperti tempat parkir dan toilet umum sangat membantu meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kami di lapangan merasakan betul manfaatnya...” (Wawancara dengan Musanip 10 Juni 2025)

Bukan berarti tidak ada hambatan. Tidak selamanya dunia pariwisata ramai. Ada juga masa sepi atau dikenal istilah *peak season*. Selain itu juga ada pergeseran tren wisata. Kejadian ini kemudian berdampak langsung pada pelaku usaha lokal seperti homestay dan kuliner desa. Untuk mengatasinya pemerintah desa bersama tim inovasi mulai mengembangkan program berbasis tren digital dan minat wisatawan baru, seperti pembuatan konten promosi wisata melalui media sosial, paket wisata tematik (kopi, pertanian, budaya), serta penguatan event-event lokal yang mengundang partisipasi luar desa.

Bila diringkas peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Desa Wisata meliputi tiga aspek. Pertama, pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju lokasi wisata, tempat parkir, toilet umum, dan papan informasi. Kedua, pendampingan administratif seperti pengurusan izin *homestay*, pengajuan bantuan UMKM, dan sertifikasi produk local. Ketiga, penyelenggaraan pelatihan dan kerjasama lintas sector juga menjadi bukti kuat peran yang dijalankan desa.

Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator berkaitan dengan peran menggerakkan partisipasi berbagai pihak dalam hal ini pengembangan Desa Wisata. Pelaksanaan pembangunan ini tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga swasta dan pemerintah. Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pihak swasta dan masyarakat sendiri harus dilakukan secara terencana serta pemberian bimbingan dan pengarahan harus dilakukan dengan intensif dan efektif.

Peran *dinamisator* adalah kemampuan pemerintah, khususnya pemerintah desa, untuk menjadi penggerak perubahan dan inovasi di tengah masyarakat. Pemerintah desa sebagai

dinamisor bertugas menjaga agar dinamika pembangunan terus berjalan, tidak stagnan, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desa wisata, peran ini mencakup mendorong kreativitas warga, membuka ruang kolaborasi lintas generasi, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program yang sedang berjalan.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisor yaitu:

- a. Memberikan Petunjuk dan arahan untuk menjaga kebersihan dan melestarikan kealamian objek wisata tersebut.
- b. Memberikan Pelatihan Kegiatan yang mengarahkan masyarakat sekitar Desa Wisata untuk mengasah keahlian mereka dalam pembuatan souvenir atau oleh- oleh khas dari daerah tersebut untuk diperjual belikan pada pengunjung.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Desa mengenai peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisor,

“...(K)ami juga beri ruang kreativitas kepada generasi muda untuk menciptakan produk wisata baru seperti wisata kopi, wisata budaya, atau digital tour. Harapannya, wisata ini bukan musiman, tapi menjadi identitas dan sumber ekonomi utama desa”(Wawancara L. Sujian 6 Juni 2025)

Langkah Kepala Desa kemudian mendapatkan persetujuan dari pelaku wisata sebagaimana diungkapkan pada bagian di bawah ini,

“Sebagai petugas wisata, saya melihat langsung bagaimana ide-ide kreatif dari anak muda sangat berkontribusi, misalnya dalam pengembangan wisata kopi, pertunjukan budaya, dan bahkan tur digital. Itu bukan hanya menambah daya tarik, tapi juga memberi rasa bangga bagi masyarakat karena kearifan lokalnya diangkat dan dikemas secara menarik. Evaluasi rutin setiap tiga bulan juga membantu kami untuk tetap fokus.”
(Wawancara dengan Musanip 10 Juni 2025)

Pendekatan yang dilakukan pemerintah desa sangat efektif dalam membangun semangat masyarakat. Masyarakat merasa dilibatkan secara aktif dan diberi ruang untuk mengemukakan pendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Bahkan keberadaan kelompok-kelompok wisata berbasis tema seperti kuliner, budaya, dan alam dinilai mampu menghindari kejenuhan program dan memperkuat identitas desa wisata. (Damaradewi, 2025)

4. KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa Kembang Kuning dalam Pengembangan Wisata sudah bagus meskipun belum sepenuhnya sesuai harapan. Hal ini dilandasi dengan adanya 3 indikator Pemerintah Desa yaitu motivator, fasilitator dan dinamisator. Tiga indikator tersebut berjalan dengan baik namun belum bisa dikatakan maksimal untuk pengembangan objek Wisata Desa Wisata Kembang Kuning Kabupaten Lombok Timur.

Faktor penghambat dari pengembangan Desa Wisata berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan belum semua masyarakat merasa memiliki. Selain itu wisatawan datang biasanya tidak sepanjang tahun sehingga ketika musim sepi perlu dipikirkan untuk mencari peluang pekerjaan lain bagi pelaku wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, D., & Asbari, M. (2023). Transformasi pendidikan PAUD dan kesetaraan: Akselerasi peningkatan dan pendanaan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 13–17.
- Anonim. (2020). Sejarah Lombok (39): Sejarah Senggigi dan sejarah Gili Trawangan; Dari era Cornelis de Houtman hingga era pariwisata dunia. *Poestaha Depok*. <https://poestahadepok.blogspot.com/2020/07/sejarah-lombok-39-sejarah-senggigi-dan.html>
- Ashley, C., & Roe, D. (2002). Making tourism work for the poor: Strategies and challenges in Southern Africa. *Development Southern Africa*, 19(1), 61–82. <https://doi.org/10.1080/03768350220123855>
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2012). Analisis komponen pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi*. Pusat Studi Pariwisata UGM.
- Damaradewi, M. (2025). *Peran Pemerintah Desa Kembang Kuning dalam mendorong keberlanjutan desa wisata*. ITS Kes Muhammadiyah Selong.
- Dilahur, D. (2016). Geografi desa dan pengertian desa. *Forum Geografi*, 8(2), 119. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v8i2.4826>
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-based tourism: A success?* ICRT Occasional Paper No. 11. International Centre for Responsible Tourism.
- Iswanti, S. I. S., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)
- Krisnawati, I. (2021). Program pengembangan desa wisata sebagai wujud kebijakan

- pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan implementasinya. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 211–221. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1974>
- Maulidi, M. J. (2019). Wisata halal dan identitas Islami: Studi kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47464>
- Nuryanti, W. (1999). *Heritage tourism and local community involvement*. Gadjah Mada University Press.
- Sancaya, R. (2025). Lombok bikin bangga Indonesia, raih predikat pulau terbaik kedua di Asia 2025. *Detik.com*. <https://travel.detik.com/fototravel/d-8164251/lombok-bikin-bangga-indonesia-raih-predikat-pulau-terbaik-kedua-di-asia-2025?page=3>
- Sihombing, E. N. (2021). *Hukum pemerintahan desa* (1st ed.). Enam Media.
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Responsible Ecological Social Tours (REST).
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. *Publika*, 365–380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Tyas, N. W., & Damayanti, M. (2018). Development potentials of Kliwonan Village as a batik tourism village in Sragen Regency. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 74–89. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.74-89>